

Kebiasaan Sosial-Budaya dan Tradisi Keagamaan yang Memudar di Masyarakat Prambanan Pasca Orde Baru

M. Alie Humaedi

Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Email: aliehumaedi@yahoo.com

Naskah diterima 4 Maret 2013

Abstract

Prambanan is not a huge reflection of Indonesia. However, this boundary territory of Yogyakarta and Central Java, in addition to the birthplace of party founders, is a competition arena between nationalistic parties and religious parties. The PDI supporters, mostly culture-based muslims compete competitively with those of PAN and PKS, mostly theology-based muslims in the context of Muhammadiyah. Such a competition is embodied through socio-cultural and political practices among the local people. PKS often works together with Muhammadiyah or PAN and vice versa, in political campaign as well as political work. Due to this way, PKS successfully put itself in the second position of the General Election in 2009 and so has made a significant influence on the local people's fading socio-cultural habits. This paper questions the capacity and existence of religious parties in the local political competition, before and after the General Election in 2009, which gives an impact on the people's life.

Keywords: *Socio-cultural and religious habits, religious politics, Prambanan*

Pendahuluan

Pada pemilu legislatif 2009, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dalam perhitungan cepat (*quick count*) Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Lembaga Survei Nasional (LSN)menempatkannya secara nasionalpada urutan keempat.

Abstrak

Prambanan bukanlah satu gambar besar Indonesia. Namun, wilayah perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini, selain sebagai tempat kelahiran pendiri partai, juga menjadi tempat pertarungan antara partai nasionalis dan partai agama. Pendukung PDI yang kebanyakan bertipologi abangan bersaing ketat dengan PAN dan PKS yang memiliki tipologi santri dalam makna Muhammadiyah. Kontestasi keduanya diwujudkan dalam praktik sosial budaya dan politik di masyarakat. PKS seringbekerjasama dengan Muhammadiyah, juga sebaliknya, atau tidak dengan PAN, dalam kampanye dan kerja politik. Melalui cara seperti ini, PKS menduduki posisi kedua pada Pemilu 2009, dan pengaruhnya juga melekat pada memudarnya aspek-aspek kebiasaan sosial budaya di masyarakat. Tulisan ini mempertanyakan kapasitas dan keberadaan partai-partai agama dalam kontestasi politik lokal sebelum dan pasca Pemilu 2009 yang memiliki pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Kata kunci: kebiasaan sosial budaya dan keagamaan, poliitik agama, Prambanan

LSImenyebut 7,75% dan LSN 7,37%, (<http://pemilu.detiknews.com/quickcount>). Hasil survei itu mendekati kebenaran, karena penghitungan resmi KPU menyebutkan PKS memperoleh 7,88% atau sekitar 8.206.955 suara (www.kpu.go.id). Bila mengambil pendapat Burhanudin Muhtadi (2012) dan Arya

Budi (Kompas, 23 Juli 2012) tentang pembagian kluster berdasarkan ideologi; yaitu partai nasional dan partai agama, maka pundi suara yang diperoleh PKS itu telah mengantarkannya pada peringkat pertama kluster kedua. PKS telah mengalahkan partai agama lain, seperti PAN, PPP, dan PKB. Sementara urutan pertama sampai ketiga perolehan suara, masih tetap dipegang oleh partai-partai yang masuk dalam kluster pertama, partai nasional, yaitu Partai Demokrat (20,85%), Golkar (14,45%), dan PDIP (14,03%).

Terlepas dari gemerlapnya kampanye partai-partai politik kluster pertama, secara riil fenomena PKS adalah fenomena luar biasa dalam dunia perpolitikan Indonesia Pasca Orde Baru. Dua atau tiga tahun menjelang Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009, ragam aktivitas dan pesona kader PKS mulai tampak ke permukaan. Niat tulus kemanusiaan ada, namun identitas faham dan kepartaian juga kerap muncul. Satu tujuan dakwah, lain tujuan adalah politik. Ada asumsi, jalan yang ditempuh adalah jalan dakwah demi politik, atau bisa jadi keduanya saling mengisi dalam kerangka berpikir agamasisasi politik. Cara seperti ini pernah disebut Cokroaminoto (Pringgodigdo 1994; Korver 1985), tokoh Sarekat Dagang Islam (SDI-SI), dengan istilah "sepandai-pandainya siyasah" (sepandai-pandainya politik). Bagi PKS, langkah itu diikuti rangkaian kegiatan *tarbiyah*nya. Ada dua kegiatan penting *tarbiyah* yang memiliki dampak politik. *Pertama*, menjadikan kampus sebagai inkubator proses gerakan *tarbiyah*. Masjid kampus dimakmurkan, dan pengaruhnya terus berlanjut ke tempat kerja setelah kelulusannya. Tempat kerja pun akhirnya diartikan sebagai *daurah tarbiyah*-nya, daerah pembelajaran faham keagamaan (Damanik 2002). *Kedua*, pengiriman dan penempatan kader dakwah *tarbiyah* di Jawa dan luar Jawa. Pada tingkat persiapan

kader, kader awal akan dikirimkan ke berbagai wilayah. Sementara kader lanjutan akan mendapatkan kesempatan mencapai jenjang politik di wilayah potensial suara di Jawa.

Dua kegiatan di atas seringkali menimbulkan resistensi dari tokoh agama, kelompok partai, dan masyarakat. Bagi tokoh keagamaan *mainstream*, resistensi itu didasarkan pada kekhawatiran infiltrasi paham Ikhwanul Muslimin, Pan Islamisme, dan Wahabisme ke dalam kebiasaan praktik keberagamaan masyarakatnya. Bagi tokoh partai, kehadiran kader *tarbiyah* selalu beriringan dengan pembesaran PKS sebagaimana yang terjadi di berbagai wilayah. Sementara itu, resistensi yang dilakukan masyarakat didasarkan pada argumen bahwa kebiasaan sosial tradisi yang ada di lingkungannya akan selalu memudar bersamaan dengan datang dan berdakwahnya kader *tarbiyah* (simpatisan PKS). Bahkan, tidak jarang resistensi itu dikaitkan dengan kekhawatiran mereka atas pengelolaan sumber-sumber daya yang dimiliki, seperti sekolah (madrasah), mushalla, dan masjid. Fenomena terakhir ini, bahkan disebut Gus Dur dalam buku *Ilusi Negara Islam* (2008) dengan istilah "si perebut masjid". Istilah ini melekat dan tumbuh kembang bersama dengan eksistensi diri PKS.

Daerah-daerah potensial untuk dikembangkan sebagai *daurah tarbiyah* dan basis suara pun dipilih kader PKS dengan memperhatikan elektabilitas dua kegiatan di atas. Dua wilayah yang dipersiapkan itu adalah Prambanan (Sleman-Klaten) dan Kalasan. Wilayah perbatasan Yogyakarta-Jawa Tengah ini semula lahan utama partai nasionalis seperti PDI, Golkar serta Demokrat di 2004. Selain disebut basis pendukung fanatik dari afiliasi partai PNI dan PKI pada Pemilu 1955 (Jackson 1990), juga disebut basis "abangan". Sebelumnya, wajar bila ada anggapan wilayah ini sampai kapan

pun akan sulit ditembus partai religius seperti PAN dan PKS. Apalagi kedua partai ini memiliki masa pendukung dengan kecenderungan tipologi "santri" Muhammadiyah. Anggapan ini pun digugurkan dengan perolehan suara PKS yang mencengangkan pada Pemilu 2009, yaitu pemenang kedua di Sleman dan Klaten. Keberhasilan itu diprediksi karena di tingkat lokal, PKS menggandeng Muhammadiyah, atau sebaliknya, tidak dengan PAN, untuk bekerja dakwah dan berpolitik.

Prambanan memang bukan citra gambar besar perpolitikan Indonesia. Namun, apa yang terjadi di Prambanan adalah contoh kontestasi antara partai berfaham nasionalis dan agama di Jawa Tengah dan sekitarnya pasca-Orde Baru. Fenomena ini bertolak belakang dengan kontestasi politik lokal menjelang Pemilu 1955. Wilayah ini dikenal sebagai "wilayah merah", yaitu basis PKI dan PNI. Tulisan ini mempertanyakan eksistensi partai agama dalam kontestasi politik lokal menjelang dan pasca-Pemilu 2009 yang mempunyai pengaruh pada perubahan kebiasaan sosial keagamaan di masyarakat pedesaan. Perubahan kebiasaan itu tercermin dari proses interaksi sosial antar individu dan kelembagaan sosial lain, seperti masjid. Sementara perubahan kebiasaan politik adalah saluran politik warga ke partai politik baru yang tidak atau jauh dari kedekatan emosional dan primordialnya.

Kepentingan Politik-Agama: Suatu Pemikiran

Dua kegiatan *tarbiyah* yang berpengaruh pada dinamika sosial keagamaan tidak akan lepas dari kepentingan dan ritme perebutan pengaruh pada aspek-aspek sosial keagamaan dan politik di masyarakat. Pertanyaannya apakah kegiatan itu berjalan alami atau ada proses perencanaan

(*by design*)? Pola kegiatannya bisa saja dilakukan secara alam seperti dengan cara sosial kemanusiaan yang lembut dan mengalir. Dikatakan lembut menunjukkan kedua aktivitas *tarbiyah* tidak dilakukan dengan cara kekerasan. Sementara mengalir berarti bahwa aktivitas itu menyatu dengan proses kebiasaan yang dilakukan masyarakat, padahal kegiatannya berbeda dari kebiasaan umum. Artinya, semua peristiwa yang terjadi seolah adalah proses sosial alami, tidak ada konstruksi sosial buatan. Namun secara sosiologi, sebuah pola, sekalipun terkesan alami, bisa dirancang oleh pihak berkepentingan, terlebih ketika pola yang ada memiliki kesamaan di tempat lain dalam waktu yang bersamaan pula. Seturut pendapat Boudrillard (1983), pola seperti ini bisa dikatakan sebagai pola permainan yang memanfaatkan ruang simulasi dan dissimulasi. Dalam konteks ini, simulasi itu diwujudkan pada media *simulacrum*, yaitu masjid dan masyarakat.

Oleh karena itu, meminjam istilah Boudrillard (1997) tentang *habitus* dan *field*, bisa dinyatakan bahwa pola simulasi itulah yang akan menghasilkan *habitus* individu dalam kehidupan sosial yang berkembang berdasar *field* yang telah diinternalisasi secara skematis. Karena *field* "sudah dikondisikan," misalnya di mana gerak dan aktivitas kader *tarbiyah* saat menguasai 'pengaruh' di masjid dan masyarakat, dan kemudian menjadikan pelakunya sebagai basis massa yang masuk dalam ranah simulasi politik akhirnya menjadi wajar dan alami. Pembentukan konsepsi sosial masyarakat telah menyetujuinya bahwa rangkaian tindakan individu dan sosial itu adalah proses sosial. Dari rangkaian kejadian ini akan jarang muncul anomali tindakan dari skema pola yang ada. Wajar bila ada keseragaman pola tindakan dan dampaknya di berbagai tempat. Penempatan kader *tarbiyah* misalnya adalah pola yang telah diskemakan dalam kejelasan *by design*, dan menguatnya

kefahaman ideologi keagamaan dan kepartaian dalam jaringan masyarakat adalah hasilnya. Prosesnya dialirkan secara runtut dan alami dengan dibatasidan dikomunikasikan melalui sistem *liqa* dan *tarbiyah*. Para agen kepentingan ini adalah kader *tarbiyah* yangmenjadi ujung tombak keberhasilan mengemas politik dalam dakwah, dan sebaliknya dakwah dalam aktivitas politik, sebagaimana dinyatakan Anis Matta (2003). Proses inilah yang menjadi strategi budaya politik tumbuh kembangnya PKS di masyarakat, pada tipologi abangan sekalipun.

Secara politik kebudayaan, PKS menurut Munandar (2011) masuk ke tipologi partai politik, karena setiap tipe partai menyediakan arena kontestasi yang tidak sama bagi kelompok yang ada. PKS tidak dapat ditempatkan dalam tipologi klasik Katz dan Mair (2001)– *the elit party* atau *the cadre party*, *the mass party*, *the catch-all party*, dan *the cartel party*– karena munculnya PKS tidak mengikuti logika evolutif dari empat tipe partai. Ia lahir dari *Tarbiyah*, gerakan sosial keagamaan yang memiliki akar historis panjang dan ideologis relatif kokoh. Dalam kasus PKS, organisasi yang oligarkis adalah implikasi khas dari perjalanan historis-kultural sebagai gerakan keagamaan bawa tanah yang berpusat pada tokoh pendiri yang hingga saat ini masih memimpin partai. Di samping itu, PKS tidak lahir sebagai representasi kelas sosial tertentu sebagaimana kemunculan partai elit yang representasi dari kelas dominan, dan partai massa sebagai artikulasi dari sub-kultur yang terpinggirkan. PKS memang menunjukkan beberapa ciri *the catch-all party*, seperti membidik hampir seluruh segmen pemilih, dan *the cartel party*, partai bersimbiosis erat antara gerakan *tarbiyah* (baca agama) dengan pemerintah dan negara. Dalam hal ini, dorongan ke *the cartel party*, setidaknya dibangun dengan doktrin non-konfrontatif, menghindari

bertentangan dengan negara, pemerintah, dan masyarakat, juga dengan berbagai pihak lain yang memegang kekuasaan, termasuk organisasi keagamaan yang dominan khususnya di masa-masa di mana jumlah dan kekuatan kader dipandang belumm memadai.

Munandar (2011) menekankan bahwa proses pembelajaran kolektif yang bersifat historis (selama menjadi gerakan *tarbiyah*) justru merupakan faktor paling mempengaruhi PKS dalam menentukan tipe partainya. Selanjutnya tanpamenyampingkan dinamika sosial, kontestasi internal merupakan faktor paling signifikan mewarnai dinamika perkembangan partai, termasuk pergerakannya dari satu tipe partai ke tipe partai yang lain. Sementara kalangan lain menganggap PKS adalah partai kader, namun tidak cocok dengan pengertian partai kader yang dikemukakan Duverger (Katz & Mair 2001), karena ia mendefinisikan partai kader sebagai partai dengan struktur yang relatif longgar, berpusat pada elit, dengan organisasi yang minimal di luar legislatif. Sebaliknya, PKS memiliki organisasi vertikal yang sangat ketat, di samping struktur yang besar dan mengakar di luar parlemen. Melalui struktur seperti ini, penyeragaman pola kegiatan *tarbiyah* pun dapat dilakukan serentak.

Metode Penelitian

Tulisan ini didasarkan penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Pengumpulan data perubahan sosial budaya dan tradisi keagamaan di masyarakat Prambanan dan Kalasan Yogyakarta dan Jawa Tengah dilakukan dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan para informan kunci. Observasi dengan keterlibatan langsung selama delapan bulan secara acak di tahun 2007-2009 dalam banyak kegiatan

sosial yang dilakukan kader *tarbiyah* pun dilakukan di wilayah-wilayah ini. Semua data perolehan dikategorisasikan sesuai wilayah dan permasalahannya, serta dianalisis berdasarkan pendekatan antropologi.

Fenomena Sosial Politik Pasca Orde Baru

Tiga tahun menjelang Pemilu 2009, beberapa kompleks perumahan menengah ke bawah di Prambanan dan Kalasan, Sleman Yogyakarta dan Klaten Jawa Tengah, banyak kedatangan penghuni baru yang mengontrak dan ada pula di antaranya yang membeli rumah. Hal seperti ini biasa juga terjadi di beberapa tempat. Namun, ada sedikit berbeda dari kedatangan para penghuni baru tersebut. Selain penampilan fisik, khususnya cara berpakaian yang sedikit berbeda, praktik hidup dan keagamaan mereka juga memiliki karakter tersendiri. Rupanya, penghuni baru itu adalah kader-kader *tarbiyah* yang berasal dari wilayah lain, baik pindah dengan alasan pekerjaan ataupun alasan pernikahan. Seiring itu, tidak jarang pula sebagaimana yang terjadi di perumahan B yang berada di perbatasan Jawa Tengah-Yogyakarta, kedatangan para penghuni baru itu kemudian diikuti oleh kedatangan pimpinan dan anggota *tarbiyah* lain. Seorang murrabi yang lama tinggal di Papua, sebut saja namanya T, ikut tinggal di perumahan tersebut dan memimpin kegiatan *tarbiyah* dan *liqa* (perkumpulan *tarbiyah*/pengajian) wilayah cabang Prambanan.

Murabbi ini awalnya mengikuti program pengiriman daimuda untuk berdakwah di wilayah terpencil, seperti Waropen Papua. Sebagai mantan santri PP Gontor, program ini menjadi "semacam kewajiban". Pada umumnya, program seperti ini dilakukan berdasarkan kerjasama Yayasan Gontor,

Departemen Agama, dan Departemen Agama Islam, Wakaf, Dakwah, dan Irsyad Kerajaan Saudi, serta yayasan seperti Rabithah al-Arabiyah dan Harramain (Wawancara dengan Haris, 15 Maret 2007). Dalam pelaksanaannya, program ini kerap dilakukan berdasarkan jaringan masing-masing tanpa koordinasi Departemen Agama. Oleh karena itu, pengiriman beberapa dai ke wilayah terpencil menjadi program tersendiri dari pesantren yang mempersyaratkan skema ini. Dalam implementasinya di lapangan, program ini sama persis dengan gerakan dari *Jamaah Tabligh* (JT) yang melakukan *tarbiyah* di mana-mana. Setiap *tarbiyah* harus dikoordinasikan oleh imam. Sang imam kemudian menjadi *murabbib* bila kelompok *tarbiyah*nya dianggap berhasil dalam misi programnya. Tugas *murabbis* sendiri terkait pada soal pemeliharaan (*ar-ria'iyah*), pengembangan (*at-tanmiah*), pengarahan (*at-taujih*), dan pemberdayaan (*at-tauzhif*) bagi para anggota (*mutarabbi*) *liqa* atau kelompoknya (Al-Waiy 2008).

Seperti kebanyakan santri, *murrabi* yang tinggal di perumahan B pun sebelumnya melakukan hal demikian. Ia memulai karir dakwah *tarbiyah*nya sebagai dai muda di wilayah terpencil. Beberapa wilayah di Papua pun dijelajahi untuk melakukan dakwah Islam kepada penduduk asli dan pendatang. Selain mendirikan madrasah, mereka pun berusaha mengaktifkan rumah, musholla dan masjid. Beberapa perkumpulan pengajian dibentuk, ada perkumpulan pengajian khusus orang Papua, orang Jawa, pengajian khusus orang Sulawesi, dan lainnya. Kontinuitas dan integritas *murabbi* T, dalam pengembangan dakwah di Papua itulah yang menjadikannya sebagai salah satu kader terbaik *tarbiyah* di Papua. Perjuangan *tarbiyah*nya dimulai sejak menjadi dai muda, menjadi imam, dan akhirnya *murabbi* beberapa kelompok (*liqa*) *tarbiyah*nya yang telah menempatkan orang ini layak

dipromosikan untuk pengembangan dan penguatan kader *tarbiyah* di Jawa. Bahkan, karena ia termasuk menjadi kader ahli, ia pun akhirnya menjadi anggota yang berpengaruh di Majelis Syura PKS Sleman pada 2007. Sebagaimana diketahui, bahwa dalam AD RT PKS, jenjang ini diperoleh berdasarkan pertimbangan tiga jenis representasi; geografis yakni kewilayahan; representasi *tarbiyah* atau tingkat kekaderan; dan terakhir representasi keahlian (profesionalisme) yakni dipilih karena *skill* yang dimilikinya. Dalam jenjang kaderisasi PKS sendiri terdapat 6 tahapan; Kader Pemula, Kader Muda, Kader Madya, Kader Dewasa, Kader Ahli, dan Kader Purna (PKS 2000; dan Syihabuddin 2006).

Sesampainya di Jawa, sang *murabbiT* pun diberi tempat terhormat sebagai guru dan dewan pengurus inti SD Yayasan B, milik pendiri PKS. SD ini adalah sebuah sekolah yang memberikan pembelajaran Islam tradisional dalam sistem pengajaran terpadu dan modern. Dalam soal keagamaan, *murabbiT* pun telah mampu masuk ke dalam *ketakmiran* (pengurusan) masjid. Bacaan al-Qur'an yang baik, diiringi kemampuan menjadi imam dan khatib telah menjadikan dirinya dapat diterima pada komunitas masjid. Sedikit demi sedikit, masyarakat perumahan pun mengelompokkannya sebagai kelompok "wong masjid". Sebuah sebutan bagi individu yang aktif beribadah, mengurus berbagai kegiatan sosial keagamaan dan menjaga sarana masjid (Wawancara dengan Bpk Han, 8 Juli 2006). Pada awal kehadirannya, *murabbiT* hanya menjadi *makmum* (pengikut), seperti jamaah lain. Bedanya, seusai shalat, *murabbiT* tetap tinggal di dalam masjid dalam waktu relatif lama. Ia kemudian beritikaf, berdzikir, dan mengaji. Hal ini rutin dilakukan pada setiap waktu shalat di masjid, khususnya ketika ia tidak memiliki jadwal mengajar.

Dapat dinyatakan bahwa hampir setiap waktu shalat, pastilah ia segera bergegas untuk mendirikan shalat. Inilah yang membedakan *murabbiT* dengan orang lain di perumahan, sekalipun mereka yang berasal dari kelompok *wong masjid*.

Secara keagamaan, *wong masjid* adalah kelompok yang masuk dalam tipologi santri, seperti istilah yang dikemukakan Geertz (1960). Namun, sebagai sosok individu dan bagian dari kerumunan sosial, *wong masjid* pun tidak pernah lepas dari penilaian tentang citra diri. Seiring itu, *murabbiT* pun telah mengisi kegiatan masjid. Kontinuitas menjadi imam dalam aktivitas rutin makin meningkat, bahkan menggantikan jadwal khutbah orang lain (Wawancara Bpk Is, 3 Juli 2007). Jadwal khutbah dan pengajian ustadz setempat yang dikenal komprehensif dalam analisis sosial, kepekaan atas realitas sosial, dan isinya paling keras dalam menentang persoalan politik untuk tidak dibawa masuk ke masjid, dan diganti *murabbiT*. Bahkan, jadwal khatib lain yang telah ditetapkan sebelumnya, diberikan pula kepada dua kader PKS, yaitu dr. A (dokter RSI Hidayatullah) dan L (Ketua PKS Sleman). Tidak hanya persoalan praktik ibadah di masjid, beberapa kegiatan anak dan remaja mulai disisipi dengan bendera partai PKS. Anak-anak dan remaja masjid diajak ke acara yang diselenggarakan jaringan PKS. Pertemuan pengajian para ibu di luar masjid semakin rutin. Pertemuan ini dikoordinasikan dan diselenggarakan oleh istri kader, seperti istri *murabbiT*, istri dr. A, dan Istri L dalam bentuk *liqa* kecil dan *tarbiyah* dengan mendatangkan ustadzah-ustadzah dari luar perumahan. Tidak hanya ustadzah yang didatangkan, tetapi juga anggota jamaah PKS wilayah lain pun dilibatkan. Bukan hanya *liqa* yang digiatkan, tetapi kegiatan semacam arisan produksi ekonomi dan usaha ekonomi berbendera partai pun digerakkan oleh para kader ini (Wawancara dengan Ibu Ton, April 2008).

Seiring hadirnya kader PKS ke perumahan, baik menetap atau sekadar mengikuti kegiatan keagamaan, muncul keyakinan bahwa semua ini dilakukan demi penguatan basis massa dalam persiapan Pemilu 2009. Keyakinan ini semakin menguat, ketika kader PKS hanya bergerak untuk anggota masyarakat level menengah, yang sekiranya telah memiliki basis massa di masyarakat. Oleh karena itu, kedekatan *murabbi* dengan ketua takmir masjid yang sebenarnya kader Muhammadiyah telah membuahkan masuknya beberapa orang perumahan ke jaringan PKS. Merekalah yang kemudian secara aktif bergerak untuk mencari kader baru, baik dari kalangan orang tua maupun anak muda (Wawancara dengan Bapak Han, 24 April 2007; Bapak Bedoyo, 29 April 2007 di perumahan B).

Kebiasaan Sosial Budaya yang Memudar

Sebelum kedatangan dan menguatnya kader PKS yang ber-*simulacra* ke jaringan *tarbiyah* di perumahan B, suasana toleransi antara "orang biasa", sebutan masyarakat bagi individu yang dikategorikan sebagai *abangan* dalam tipologi keagamaan Clifford Geertz (1960) dan orang Kristen dengan *wong masjid*, sebutan masyarakat untuk individu yang dikriteriakan sebagai kelompok santri (dalam makna NU dan Muhammadiyah), terjaga dengan baik. Tidak ada pernyataan kebencian yang ditampakkan secara terbuka. Semua kelompok masyarakat berjalan apa adanya, tidak begitu mempersoalkan ikatan ideologi di antara mereka. Semua anggota masyarakat dapat bekerja sama secara lintas keagamaan, dan solidaritas pun dibangun berdasar kepentingan bersama secara sosial. Namun, semakin menguatnya jaringan PKS di perumahan, baik yang mengatasnamakan gerakan keagamaan (*tarbiyah*) atau politik kepartaian PKSnya telah membuat

perbedaan ideologi dan golongan di antara kelompok masyarakat itu semakin tampak ke permukaan. Batas-batas antara orang *abangan* dengan *wong masjid* semakin nyata dan diwujudkan dalam bentuk tindakan.

Semenjak orang perumahan banyak yang masuk ke aktivitas PKS, Bpk Han, seorang *abangan* yang berasal dari Pekalongan, misalnya, mulai merasa bahwa ia sering tidak dipedulikan dan disapa oleh tetangga dekat rumahnya yang baru berideologi PKS, yang sebelumnya baik terhadap diri dan keluarganya (Wawancara dengan Bapak Han, 17 Maret 2007). Sama perlakuannya terhadap Nenek M seorang Katolik, ia diacuhkan dari pergaulan bertetangga, akibat tetangga lama sekarang memilih aktif dan masuk ke dalam jaringan PKS. Nenek Myang merupakan penghuni pertama di perumahan merasakan bahwa di tiga tahun terakhir ini terjadi banyak perubahan. Terlebih ketika arus keluar masuknya orang ke perumahan semakin sering, terlebih masuknya orang yang secara fisik telah menunjukkan seorang kader. Mereka yang memiliki hubungan dengan SDIT, RSI, kader utama HNW, beberapa sekolah Islam Terpadu di wilayah Prambanan dan Klaten rata-rata mengontrak rumah di perumahan ini (Wawancara dengan Nenek Mit, Perumahan B, 19 Maret 2007).

Para tetangga yang berada di sekitar rumah yang dikontrak, biasanya selalu berubah. Demikian juga sikap yang ditunjukkan *wong masjid* kepada Nenek M dan keluarganya sekarang berubah. Apalagi saat kader PKS itu tahu bahwa suami Nenek M tersebut keluar dari Islam dan memilih mengikuti agama istrinya, keluarga ini pun semakin dijauhi. Wacana perbedaan agama semakin menguat, yang berdampak pada pengkotakan anggota masyarakat berdasarkan identitas keagamaan dan kepartaiannya. Seorang ustadz setempat yang kerap ikut

menjadikan menghormati orang *abangan* dan Kristen dengan cara pelibatan mereka dalam setiap aktivitas sosial yang diselenggarakan oleh pengurus masjid, seperti lomba anak, kerja bakti, halal bi halal, dan pembagian daging kurban, telah tergusur dari kepengurusan masjid. Sebelumnya, melalui berbagai pertemuan masyarakat dan khutbah keagamaan, ustadz ini seringkali menganjurkan agar *wong masjid* selalu bersikap baik dan menghormati tetangga-tetangganya yang non-Muslim (Wawancara dengan Bapak Mi, 2 April 2007). Posisi dalam kapasitas itu tidak ada lagi yang menggantikannya.

1. Dakwah Komunitas menjadi Strategi Politik

Pada musim kampanye Pemilu 2009, *liqa* di perumahan dan wilayah sekitarnya lebih diaktifkan. Saat itu terlihat jelas bahwa setiap hari di pagi hari, ibu-ibu perumahan diundang mengikuti pengajian di rumah istri dr. A, kontrakan *murabbi*, rumah Hen atau kader lain. Pengajian ini tentu bertabrakan dengan jadwal pengajian rutin pagi hari yang diselenggarakan masjid al-Ikhlâs. Ibu N sebagai pengelola pengajian rutin pun merasa bahwa intensitas kegiatan *tarbiyah* PKS saat Pemilu 2009 itu tinggi (Wawancara dengan Ibu N, November 2009). Tidak hanya pengajian pagi hari, saat itu kelompok Irmas (remaja masjid) dan ibuperumahan di tiap minggunya seringkali dikumpulkan dalam kelompok kecil untuk belajar dan pemberdayaan ekonomi sesuai bidang yang diminati. Mereka masing-masing dipimpin kader PKS. Lalu lintas anggota *liqa* untuk mengikuti *tarbiyah* di beberapa tempat sering terdengar. Kader terbaik PKS pun dikirimkan ke perumahan dan tempat *liqa* di wilayah sekitar perumahan untuk mengisi *tarbiyah*. Selain soal keagamaan, mereka juga mempresentasikan *tarbiyah* dalam soal kesehatan dan menjanjikan jaminan kesejahteraan ekonomi bila PKS

mendapat suara banyak di parlemen dan kementerian (Wawancara dengan Bpk Y, kader baru PKS, 14 Juli 2007). Mereka juga memberikan bukti bahwa Departemen Pertanian yang saat itu menterinya adalah kader PKS telah ikut membantu masyarakat dengan cara revitalisasi pertanian dan masyarakat petani di wilayah Sleman. Menurut mereka, ribuan petani telah diberi dukungan dana untuk membeli bibit dan pupuk, serta memperbaiki lahan pertanian yang ada. Selain itu, ratusan rumah petani dibedah dan dibangun oleh departemen ini (Wawancara dengan Ustadzah F di Pesantren BU, 8 November 2009). Bukti keberhasilan Deptan seperti ini yang dijanjikan kepada calon kader PKS di perumahan dan wilayah sekitar perumahan Prambanan.

Akhirnya, strategi politik dengan memberdayakan dakwah komunitas *liqa tarbiyah*, diiringi pola kampanye dan janji politik telah menghasilkan kemenangan “tidak terduga” bagi PKS Yogyakarta, terlebih untuk wilayah Sleman. Secara mengejutkan, pada Pemilu 2009, PKS memperoleh 8 kursi DPRD dari Sleman 3 (Prambanan, Kalasan dan Berbah). Berdasarkan Hasil Rekap Suara dan Daftar Anggota Legislatif tahun 2009 KPU Sleman (2009) dan KPU Propinsi (www.kpu-diy.go.id), anggota DPRD dari wilayah Sleman 3 itu adalah Setiaji Heru Saputro, Hendrawan A, dr. Rima Fitriyani, Catur Wibisana (Kalasan), Suprihantini, Nur Khasanah (Prambanan), Teguh Haryono (Berbah), dan Ely Susilowati (Kalasan). Perolehan kursi PKS dari wilayah Sleman 3 ini berada sama dengan kursi dari PDIP dan Partai Demokrat, walaupun berbeda dalam selisih jumlah suaranya. Suara terbanyak diperoleh oleh PDIP (23.452 suara), PKS nomor dua (22.178 suara), dan Partai Demokrat (20.891 suara). Suatu proses dan hasil perolehan suara yang sebelumnya tidak pernah terjadi sebelum reformasi di wilayah yang dikenal sebagai lumbung kaum merah.

2. Resistensi Setengah Hati

Masjid di perumahan itu bukan masjid (milik) NU atau Muhammadiyah, namun masuknya gerakan agama-politik PKS memunculkan tiga kecenderungan. *Kecenderungan pertama*, semakin menguatnya usaha melabelkan, menyimbolkan atau merepresentasikan identitas kefahaman (ideologi) diri secara formal, baik sebagai orang NU ataupun orang Muhammadiyah. Formalisasi ini bisa saja diwujudkan dalam bentuk pelabelan seperti masjid NU dan komunitas NU, beserta internalisasi kefahaman. Kecenderungan ini sifatnya sangat terbatas, karena hanya berada pada dataran kelompok elit kefahaman, juga pada individu yang memiliki pengalaman bersama terhadap lembaga tradisi keagamaannya, seperti pesantren bagi orang NU dan jaringan *mualimat* bagi orang Muhammadiyah.

Kecenderungan kedua, tidak jarang masyarakat mempersilahkan atau membiarkan kader PKS untuk mengelola dan mengurus masjid. Kecenderungan ini dijumpai pada masyarakat yang tidak memiliki kelompok elit keagamaan, sebagai modal sosial budaya. Pilihan ini tampaknya dilakukan sebagai cara terbaik, daripada tidak ada yang mengurus masjid dan jaringan yang dapat memberikan pelajaran keagamaan bagi anggota masyarakat. Soal sifat faham keagamaan dan kepertaian PKS akan dikembalikan kepada sikap kedewasaan masyarakat. Kalaupun mereka menganggap bahwa PKS cocok untuk diri dan keluarganya, pastilah mereka akan menjadi simpatisan dan tidak mustahil menjadi kader organisasi politik agama ini. Kalaupun tidak cocok, mereka hanya memanfaatkan PKS sebagai agen masyarakat yang hasilnya akan dicicipi oleh keseluruhan anggota masyarakat.

Kecenderungan ketiga, kelompok elite keagamaan awal mengambil jarak dengan masjid atau bahkan meninggalkan masjid

yang telah terinfiltrasi kader PKS, seperti yang terjadi pada kasus masjid perumahan di atas. Pengambilan jarak bisa jadi karena rasional kalkulatif bahwa mereka tidak mungkin melawan PKS secara terbuka, karena ketiadaan dukungan atau kekecewaan yang mendalam dari jaringan mapan yang selama ini dipegang, yaitu NU dan Muhammadiyah secara organisasional. Hal ini semakin diperparah dengan konflik internal kelompok elite di masjid. Pertanyaan nakal yang dapat diajukan adalah siapa sebenarnya yang menciptakan konflik itu? Padahal sebelum maraknya gerakan *tarbiyah* PKS, konflik itu dapat diredam dengan konstruksi sosial yang menyatakan bahwa semuanya memiliki kepentingan bersama untuk memajukan masjid dan masyarakat. Kondisi ini yang membawa kesimpulan bahwa resistensi terhadap politik agama PKS beserta jaringan dakwahnya dalam banyak kasus adalah resistensi setengah hati.

Runtuhnya Keyakinan Umum Afiliasi Politik Kaum Abangan

Perolehan suara PKS pada Pemilu 2009 yang cukup signifikan di wilayah perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah telah menggugurkan asumsi umum bahwa wilayah ini adalah lumbung abadi partai-partai nasionalis. Asumsi ini didasarkan pada hasil pemilu sebelum tahun 2009. Pada Pemilu 1955, misalnya, Yogyakarta dan Jawa Tengah secara umum, dan wilayah pinggiran Yogyakarta seperti Prambanan, dan Klaten secara khusus, adalah basis utama massa PKI dan PNI (Jackson 1990; Mulkhan 2006). Menurut koran Angkatan Bersendjata tahun 1956, wilayah Manisrenggo yang berada di Barat-Utara Perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, sebagian besar penduduknya berafiliasi secara politik ke PKI, selebihnya berafiliasi politis ke PNI. Sedikit berbeda dengan Manisrenggo, perolehan suara di Prambanan pun

hampir 34% adalah PKI, dan 62% PNI, dan selebihnya terbagi kepartai lain, semisal partai NU (1%), Masyumi (1%), SI (1%), dan partai buruh (3%).

Berdasarkan informasi Bpk Ulfa, pengurus Muhammadiyah di Gandu Manisrenggo (Wawancara 18 Juli 2008), wilayah tetangga Prambanan, PKI dan PNI mendapat banyak suara di wilayah perbatasan ini, karena ide dan janji tentang pembebasan dan pemilikan tanah *vorstenlanden* untuk rakyat yang diusungnya. Di samping itu, ada kecenderungan bahwa kedua partai ini akan menang di wilayah yang masyarakatnya memiliki tipologi *abangan* dalam kacamata Geertz dan Heffner (1997). PKI dan PNI sangat mengakomodir kepentingan orang *abangan*, baik dalam argumen kebebasan beragama dan berkepercayaan ataupun saat mereka memperjuangkan pengakuan-pengakuan terhadap kepercayaan asli orang Jawa semacam ADRI (Agama Djawa Republik Indonesia). Kondisi seperti ini terjadi juga di wilayah Wonogiri dan Gunungkidul (Profil Wonogiri tahun 1950-1960). Pengaruh PKI di dua kawasan pinggiran propinsi ini tidak hanya menyebar ke sanubari rakyat kecil yang termakan janji-janji kepemilikan tanah dari tanah *vorstenlanden* Belanda dan usaha pembebasan tanah sultan (*Sultan Ground*), jaminan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan ide ketidakcampuran (sekularisasi) antara negara dan agama, di mana agama menjadi urusan individu. Ideologi dan jaringan PKI pun menyebar ke kelompok menengah masyarakat, setingkat juragan tanah. Di Desa Gandu misalnya, ada lima pemilik tanah terluas yang ikut berfaham dan masuk dalam jaringan partai PKI. Menurut sumber lain, mereka berafiliasi ke PKI dalam usaha untuk mempertahankan hak kepemilikan tanah mereka dari pengakuan kepemilikan Kasunanan Surakarta (Wawancara Bapak Ulfa, 2 Agustus 2008).

Saat itu, PKI adalah satu-satunya partai yang berani mengadvokasi hak rakyat dalam kepemilikan tanah. Selain itu, empat juragan tanah memiliki kedekatan keluarga dengan petinggi PKI di Semarang dan Jakarta. Melalui jejaring empat keluarga, baik berdasarkan genealogi keturunan dan distribusi kerja dari tanah mereka, PKI pun akhirnya dapat berkembang pesat dan memiliki banyak simpatisan. Hal ini wajar karena dalam kebiasaan masyarakat pedesaan, jaringan keluarga akan mengikuti faham keagamaan dan kepartaian dari keluarga *batih*. Demikian juga, para buruh yang mengelola aset keluarga *batih* pun ikut berfaham dan berafiliasi partai yang sama dengan sosok yang menjadi pusat kekuatan *batihnya*. Penyebaran faham PNI pun hampir sama dengan PKI, walaupun memiliki perbedaan dalam pola dan usungan janji kampanyenya. Bila PKI kerap mengusung ide dan janji kepemilikan dan pembagian tanah yang merata dan persoalan ekonomi, maka PNI lebih banyak mengusung ide tentang nasionalisme dan pemenuhan hak-hak kaum pribumi (Hefner 1997). Bila PKI berkembang dengan ketertarikan orang dengan jargon dan janji yang diusung, maka PNI menyebar dengan cara lembut melalui ikatan-ikatan tradisional.

Selama wawancara, semisal dengan Bapak Han (5 Juli 2007), Gt (14 Juli 2007), dan Surian (15 Juli 2007), tidak pernah dijumpai seorang informan pun yang menyatakan bahwa "saya ikut PNI, karena program ini atau itu bagus", tetapi lebih berargumen pada kenyataan bahwa "ayah mereka dan keluarga besarnya adalah seorang PNI." Hal seperti ini pun bermetaporsis kepada simpatisan PDI Perjuangan. Inilah pola yang sedikit berbeda dengan PKI. Meskipun PKI juga menggunakan jaringan keluarga, namun jaringan ini tidak bersifat ketat dan masuk dalam ikatan tradisi keluarga, tetapi ikatan ini dibangun berdasar pada pertimbangan ekonomi produksi atau

semacam *patron-client* dalam *mode of production*nya, seperti yang digambarkan dalam roman *Para Priyayi* karya Umar Kayam (2004), dan *Siluman Karangkoobar* karya Soewarsih Djoyopoespito (1959).

Selama kurun tahun 1950, dan pasca 1955 sampai 1980-an, wilayah pinggiran atau perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah ini dapat dikatakan belum tersentuh secara intens oleh aktivitas organisasi keagamaan dan partai politik berideologi keagamaan. Sampai tahun 1990 saja, wilayah perbatasan ini tidak memiliki sekolah madrasah dan pesantren. Dalam catatan masyarakat, masjid yang ada di wilayah Kecamatan Prambanan Yogyakarta hanya dua, yaitu masjid Bogoharjo, sebagai masjid tertua yang dibangun pada tahun 1982-an, yang kemudian desa ini menjadi basis Muhammadiyah; dan masjid di desa perbatasan Prambanan Timur-Selatan dan Kecamatan Piyungan Bantul, yang kemudian menjadi basis organisasi NU (Wawancara dengan Bapak H. Chalid, Pengurus Muhammadiyah, 11 April 2007, 26 Juni 2007; dan Bapak Suryadi, Pengurus NU, 27 Mei 2006). Ketiadaan aktivitas keagamaan yang kurang memadai ini berdampak pada perolehan suara partai politik yang mengatasnamakan agama di Pemilu 1955. Di wilayah kecamatan (*onderdistrik*) Prambanan, Yogyakarta, misalnya, Partai NU dan Masyumi hanya memperoleh tidak lebih dari 2% saja (210 suara). Bahkan, ada beberapa desa di Prambanan yang memiliki angka nol untuk partai agama, seperti Bokoharjo, Wukirharjo, Genteng, dan Klurak. Fenomena seperti ini berlangsung hingga Pemilu 1992, di mana posisi PNI digantikan oleh kemenangan PDI, dan suara simpatisan PKI sebelumnya dialihkan ke Golkar. Setelah tahun 1990, terlebih di Pemilu 1999, partai agama seperti PPP telah mendapatkan suara lebih banyak, karena pengalihan dari simpatisan Golkar (Wawancara dengan Bapak Mansur, 28 Juni 2008).

Hampir sama dengan perbatasan Yogyakarta, maka perbatasan Jawa Tengah pun mengalami hal serupa. Desa-desa yang berada di Kecamatan Manisrenggo, dan Prambanan Klaten Jawa Tengah pun belum tersentuh oleh aktivitas organisasi keagamaan dan partai agama yang memadai. Dapat dikatakan, semua wilayah ini menjadi lumbung suara partai PKI dan PNI pada Pemilu 1955. Kemenangan partai PNI di desa-desa ini rata-rata 50-70% suara, dan PKI antara 20-30% suara. Sisa perolehan suara biasanya terbagi ke partai agama dan buruh. Di Desa Kranggan, Mandungan, dan Gandu Manisrenggo, kemenangan partai PNI mencapai 70% dan disusul PKI sekitar 20-30%. Di wilayah ini, partai agama sedikit mendapatkan suara, tidak lebih dari 5-7 suara saja per desanya (Keterangan ini awalnya didasarkan pada wawancara dengan H. Chalid dan H. Suryadi; dan diperkuat beberapa dokumen; Angkatan Bersendjata, 21 Desember 1956; Kedaulatan Rakjat 15 Juni 1978).

Sama dengan Manisrenggo, desa-desa Kecamatan Prambanan Klaten menunjukkan fenomena serupa. Hanya ada satu desa yang sedikit memperoleh suara banyak untuk partai agama (NU dan Masyumi), yaitu Desa Karangnongko, di mana di wilayah ini ada satu masjid tertua yang dibangun pada tahun 1950-an oleh seorang aktivis Muhammadiyah. Desa inilah yang menjadi desa kelahiran dari Hidayat Nur Wahid. Dalam perkembangan terakhir, desa-desa yang berada di sekitar wilayah kelahiran HNW inilah yang akhirnya menyemaikan dua faham keagamaan, yaitu Muhammadiyah dan kegiatan *tarbiyah* (PKS); dan dua kecenderungan organisasi politik, yaitu PAN dan PKS. Oleh karena itu, para pengikut atau anggota faham dan organisasi keagamaan dan kepartaian itu biasanya masih memiliki hubungan kekeluargaan. Demikian juga para patron kharismatik keagamaannya. Tidak jarang, kedekatan mereka kemudian diwujudkan

dengan bentuk-bentuk kerja sama sinergis antara kader Muhammadiyah dengan kader PKS, misalnya dalam pengurusan masjid dan penanganan bencana pasca gempa bumi Yogyakarta tahun 2006.

Momentum kerjasama yang spektakuler itu misalnya diwujudkan dengan wakaf dua masjid yang "dibangun" oleh jaringan PKS dengan pendanaan dari Pemerintah Qatar untuk Muhammadiyah, misalnya masjid Prambanan, dekat perbatasan Jawa Tengah-Yogyakarta, dan masjid di Klurak Bogoharjo Yogyakarta. Peresmian serah terima itu dilakukan HNW dan Din Syamsudin menandakan bahwa Muhammadiyah dan PKS seolah bekerjasama keagamaan di tingkat nasional (Wawancara Bpk Ulfa, Juli 2010). Kerjasama seperti inilah yang awalnya diduga dilakukan pula oleh Bpk. Hen dengan *murabbi* dalam mengelola masjid di perumahan B di atas. Walaupun di saat menjelang Pemilu 2009, Muhammadiyah melalui Keputusan No. 149/KEP/1.0/B/2006 tentang Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah, disebut juga "Dokumen Penyelamatan Organisasi dan Faham Ke-Muhammadiyah di seluruh cabang Indonesia", dari pengaruh PKS. Bahkan dalam butir 3 keputusan disebutkan "segenap anggota Muhammadiyah perlu menyadari, memahami dan bersikap kritis bahwa seluruh partai politik di negeri ini, termasuk partai politik yang mengklaim diri atau mengembangkan sayap/kegiatan dakwah seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah benar-benar partai politik. Setiap partai politik berorientasi meraih kekuasaan politik...". Jika Muhammadiyah tidak khawatir atas kegiatan dakwah-politik PKS, mengapa keputusan itu jelas menyebut PKS sebagai salah satu contoh? Kekhawatiran Muhammadiyah atas gerakan dakwah-politik PKS juga terjadi pada NU. PBNU telah mengeluarkan dokumen penolakan ideologi dan

gerakan ekstremis transnasional, di mana salah satu gerakan itu adalah PKS yang mirip dengan Ikhwanul Muslimin. NU juga mengeluarkan Keputusan *Bahtsul Matsail* NU tentang khilafah dan formalisasi syariah yang dibicarakan di PP Zainul Hasan, Genggong tahun 2007 (Wahid 2008: 252).

Implementasi keputusan PP Muhammadiyah menyebabkan timbulnya perpecahan di kalangan para kadernya, terlebih di wilayah perbatasan seperti Prambanan. Beberapa tokoh Muhammadiyah yang masih fanatik tetap mempertahankan paham ini sebagai basis internalisasi keagamaan, dan PAN sebagai afiliasi politiknya. Mereka juga berusaha mengembangkan dakwahnya ke arah Manisrenggo dan Gantiwarno. Secara politis, usaha keagamaan ini telah memberikan sumbangan besar bagi perolehan 2 kursi PAN di Dapil Klaten 2 (Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Jogonalan, Kemalang, Karangnongko dan Manisrenggo) dan dua kursi PAN pula untuk Dapil Sleman 3 pada Pemilu 2009. Meskipun jumlah kursi PAN itu hanya dua, namun dilihat dari akar kesejarahan wilayah politik kepartaian yang menjadi basis massa fanatik PNI dan PKI jauh sebelumnya, dan PDIP dan Golkar di zaman Orde Baru, dan PDIP-Demokrat-Golkar pasca Reformasi, maka dua kursi itu dapat diukur sebagai terobosan hebat. Sementara, bagi kader fanatik dan simpatisan PKS, gerakan dan jaringan dakwahnya telah membuahkan hasil serapan politik berupa satu kursi DPRD dari Dapil Klaten 2. Perolehan kursi ini seimbang dengan PKB dan PPP. Namun tetap kalah dengan partai nasionalis, yaitu PDIP yang memperoleh 3 kursi. Namun secara umum, PKS memperoleh hasil gemilang dalam perhitungan se-Kabupaten Klaten.

Satu kursi PKS yang berasal dari Dapil Klaten 2 di atas ditempati oleh Muhammad Agung Sdengan perolehan

suara khusus untuk dirinya sebesar 1.800, di mana sebesar 1.064 suara berasal dari wilayah Prambanan Klaten. Perolehan suara Agung merupakan 75% dari jumlah suara PKS yang berasal dari Dapil Klaten 2 wilayah Prambanan (2.987 suara). Suara ini paling besar dibandingkan di wilayah lain yang masuk menjadi bagian dari Dapil Klaten 2 yang jumlah keseluruhannya mencapai 9.125 suara. Besarnya suara PKS untuk Agung S, meskipun berada pada rangking 48 dari 50 peringkat suara sah daftar terpilih

anggota DPRD se-Kabupaten Klaten berasal dari jaringan keluarga Agung dan kader fanatik PKS Prambanan. Pada masa kampanye, massa PKS Prambanan Klaten diarahkan pada pilihan untuk memilih dia, dan HNW untuk tingkat DPR Pusat. Seperti orang PKS umumnya, Agung Suryantoro pun pada awalnya adalah kader Muhammadiyah. Ia bertemu dan melakukan kontak dengan jaringan *tarbiyah* PKS selama di kampus. Di bawah ini disebutkan tabel lima besar pemenang Pemilu 2009 di wilayah Klaten.

Tabel 1 Lima Besar Pemenang Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten

NO	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	PDIP	507.336	21,56%
2	Partai Golkar	297.478	12,64%
3	Partai Demokrat	235.901	10.03
4	PKS	184.753	7,85%
5	PAN	167.800	7,13%

Sumber: KPUD Kabupaten Klaten 2009

Oleh karena itu, tumbuh-kembangnya PKS di tahun 2009 di wilayah perbatasan yang sebelumnya dikuasai PKI dan PNI di masa Orde Lama (Pemilu 1955), dan PDI dan Golkar di zaman Orde Baru (semua Pemilu di zaman Orde Baru), merupakan fenomena politik agama yang luar biasa uniknya. Terlebih untuk peta politik di wilayah Sleman Yogyakarta. Dalam perhitungan umum Dapil Sleman 3, PKS tidak hanya mampu mewarnai hasil perolehan suara pemilu tahun 2009, tetapi mereka telah mampu menyisihkan partai Golkar dari urutan nomor dua, dan menggeser suara terbanyak kursi partai PDIP dari Dapil Sleman 3. PKS bahkan menjadi pemenang dari partai yang memiliki kecenderungan religius, seperti PAN dan PPP yang telah bekerja jauh sebelumnya dan memiliki ikatan dan jaringan ideologi dan genealogi di tingkat masyarakat rumput.

Kontestasi Sesama Fahaman dan Politik-Agama

Setiap orang yang memiliki kedekatan dengan Muhammadiyah di desa perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, biasanya berafiliasi diri kepada PAN pada Pemilu 2004. Namun hal ini berubah di Pemilu 2009. Jumlah pengikut Muhammadiyah yang tercatat memiliki kartu anggota di Prambanan Sleman di tahun 2008 mencapai jumlah 4.000 orang. Jumlah ini belum ditambah anggota dan simpatisan Muhammadiyah yang belum memiliki kartu anggota yang diperkirakan jumlahnya mencapai 7.000 orang (didasarkan perkiraan pengurus Muhammadiyah, wawancara 14 Maret 2009). Jika keanggotaan ini berpengaruh kepada kefahaman jejaring anggota keluarga lain, jumlah keseluruhannya bisa mencapai 15.000-20.000 orang. Artinya, dengan dukungan fanatisme

anggota Muhammadiyah, maka PAN atau PMB (saluran politik baru warga Muhammadiyah) seharusnya meraup banyak suara di Prambanan. Dengan jumlah DPT Kecamatan Prambanan yang mencapai 37.090 pemilih (18.531 laki-laki dan 18.559 perempuan), PAN atau PMB sebenarnya dapat memperoleh suara dan wakilnya secara signifikan. Tetapi kenyataannya, PAN hanya memperoleh satu kursi, yaitu M. Fauzan Yakhsya, dan sebaliknya PMB tidak memperoleh suara yang signifikan, sehingga tidak memperoleh kursi dari Prambanan.

Bila faham Muhammadiyah biasanya berkembang dan dipegang masyarakat di desa tengah perbatasan Prambanan, seperti wilayah Prambanan, Bokoharjo, dan Madurejo, tidak demikian dengan desa-desa yang berada di perbatasan timur-selatan dengan wilayah Bantul. Daerah ini dikenal sebagai lumbung partai NU pada Pemilu 1955 dengan menghasilkan suara terbanyak mengalahkan PNI dan PKI. Giatnya aktivitas organisasi NU Bantul cabang Piyungan yang mengembangkan sayapnya secara terus menerus telah menghasilkan kecenderungan masyarakat Prambanan timur-selatan ke afiliasi politik yang mengatasnamakan NU. Beberapa madrasah Al-Ma'arif, pesantren, pengajian Muslimat dan Fatayat NU digerakkan sampai ke akar rumput. Tidak hanya itu, masyarakat pun memiliki kecenderungan *patron-client* berdasar kharismatik keagamaan, sehingga tokoh agama lokal setempat dengan mudah dapat menggiring anggotanya untuk berafiliasi politis kepada partai tertentu yang sesuai dengan kefahaman NU-nya. Hal ini didukung oleh sikap toleran dan akomodatifnya faham dan tokoh NU terhadap kebiasaan masyarakat yang masih kuat memegang tradisi Jawa dan Hindu. Sayangnya, pada Pemilu 2009, suara masyarakat NU di kawasan ini terpecah kepada PKB dan PKNU. Walaupun demikian, bila dilihat

dari perhitungan secara khusus untuk Kecamatan Prambanan saja, bukan wilayah Dapil Sleman 3 (Berbah, Kalasan dan Prambanan), jumlah suara dan kursi DPRD dari PKS sebenarnya terkalahkan dengan kekuatan afiliasi NU (PKB dan PKNU). Dari Kecamatan Prambanan timur-selatan itu, PKB memperoleh 3 kursi, yaitu Heri Wahyana, Dhomaroh, dan Sarimin, sedangkan PKNU sendiri mendapatkan dua kursi atas nama Nurhidayat dan Lekta Manuri.

Saat kampanye, calon anggota DPRD PKB dan PKNU tidak pernah menjanjikan hal baru dan janji berlebihan. Kekuatan mereka bukan berasal dari kekuatan rasional pemilih, khususnya pada persoalan program yang ditawarkan, tetapi lebih pada kekuatan tradisional, yaitu jaringan kolektivitas NU dan kharisma tokoh agama yang menjadi patronnya. Bisa dikatakan, kekuatan NU di wilayah ini tidak tergoyahkan. Meskipun jumlah kursinya berkurang dari Pemilu 2004 yang menghasilkan enam kursi, namun satu kursi itu tidak diambil oleh partai agama, seperti PKS atau PAN. Satu kursi diambil oleh Partai Demokrat. Bagi sebagian masyarakat seperti Syamsiar (Caleg Sleman, wawancara 6 November 2009), kemenangan Partai Demokrat di Prambanan, terlebih mengambil satu kursi dari wilayah Prambanan timur-selatan itu tidak perlu dikhawatirkan. Mereka yang memilih Partai Demokrat sendiri sebenarnya adalah massa Partai Golkar jauh sebelum Pemilu 2009, dan sebagian massa NU yang patron kharismatik sebelumnya telah meninggal dunia.

Melihat kasus di atas, dapat dinyatakan bahwa wilayah perbatasan timur-selatan Prambanan DIY, PKS tidak mampu mengalahkan kekuatan NU dan afiliasi politiknya. Masyarakat NU masih terjaga oleh kekuatan kharismatik patron dan jaringan kolektivitas keluarga. Jaringan keluarga

dari kiai NU yang bernama H. Ahmad di wilayah timur-selatan adalah pelopor berdirinya lembaga pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ia dianggap berjasa, kalau tidak mau disebut pembuka permukiman pertama. Pengaruh jaringan keluarga NU ini belum dapat digoyahkan hingga 2010 (Wawancara dengan Pengurus NU Sleman, 16 Juli 2009). Namun, PKS pun sedikit demi sedikit mengembangkan sayapnya ke desa-desa yang berdekatan dengan wilayah timur-selatan ini. Kasus pertarungan kefahaman di masjid di atas sebenarnya terjadi di wilayah yang berdekatan dengan pusat NU di timur selatan Yogyakarta. Menurut dokter Puskesmas yang berada di wilayah timur-selatan Prambanan, beberapa aktivitas PKS mulai merambah ke pelayanan sosial itu. Beberapa perawat telah masuk ke jaringan kader PKS. Mereka mengikuti *liqa* yang digabungkan dengan pengajian rutin dengan *murabbi* yang berasal dari perumahan, yaitu *murabbi* T (Wawancara dr. D, 18 September 2008). Selain itu, aktivitas BMT, SD, dan jaringan pasar di Gendeng telah pula mendapat sentuhan dari kader PKS. Oleh karena itu, bila tokoh dan masyarakat NU di wilayah timur-selatan Prambanan itu lengah, maka faham dan kepertaian PKS akan masuk dan menjadi penyaing dari kekuatan tradisional NU beserta afiliasi kepertaianya.

Kasus infiltrasi kader PKS di atas terlihat jelas di wilayah timur-tengah Prambanan DIY dan Jawa Tengah, di mana ketidaksiapan tokoh dan masyarakat Muhammadiyah menghadapi itu berakibat fatal bagi kebesaran organisasi dan faham kemuhammadiyah. Kader terbaik Muhammadiyah di wilayah ini akhirnya beralih ke PKS dalam arti faham *tarbiyahnya*, juga afiliasi politiknya. Aspirasi politik akar rumput disalurkan ke PKS yang menjanjikan jaminan sosial ekonomi dan internalisasi keagamaan lebih baik dari organisasi Muhammadiyah. Wilayah timur-tengah Prambanan DIY

dan Jawa Tengah yang dulunya adalah basis massa Muhammadiyah, sekarang berubah menjadi basis PKS. Terlihat jelas, bahwa Kalasan adalah pusat aktivitas dan massa PKS di Sleman. Walaupun secara khusus suara warga NU di Kalasan Dapil Sleman 3 banyak juga diambil oleh PKS. Di wilayah ini, PKB hanya memperoleh satu kursi dan PKNU satu kursi, padahal pada Pemilu 2004, PKB memperoleh empat kursi dari Kalasan ini. Tidak hanya PKB yang diambil suaranya oleh PKS, tetapi juga PAN. Kata diambil menunjukkan perubahan jumlah suara dan kursi yang diperoleh setiap partai, dan meningkatnya jumlah suara dan kursi PKS. Pada Pemilu 2004, berdasarkan data KPU Sleman (www.kpu-sleman.go.id). PAN memperoleh lima kursi dari Kalasan. Tetapi, pada tahun 2009, PAN hanya memperoleh satu kursi saja atas nama Nurhidayat. Suaranya kemudian terbagi ke PMB yaitu dua kursi dan ke PKS dua kursi.

Dapat dikatakan, PKS mendapat kemenangan besar di Kalasan. Dari dapil kecamatan, PKS memperoleh empat kursi. Jumlah kursi yang banyak ini memosisikan PKS sebagai pemenang pertama yang mengalahkan partai besar, seperti Demokrat (3 kursi), Golkar (2 kursi), dan PDIP (2 kursi). Partai kecil yang mampu menerobos ke nomor dua perolehan suara di Kalasan adalah Partai Hanura (3 kursi). Banyaknya suara Hanura lebih disebabkan jaringan Wiranto dan pensiunan TNI yang kebanyakan bermukim di Kalasan (Wawancara dengan Koprak Waskita, 18 November 2009). Dari empat kursi yang dimiliki PKS di Kalasan, hanya satu yang bukan berasal dari kader Muhammadiyah atau PAN. Satu berasal dari jaringan NU, dan dua orang lain kader Muhammadiyah yang berpindah ke PKS.

Awalnya, Muhammadiyah berkembang pesat di Kalasan, dibuktikan dengan perolehan suara yang cukup signifikan

bagi Partai Masyumi tahun 1955 (1 kursi), dan PAN pada Pemilu 2004 (5 kursi). Tetapi, kejayaan Muhammadiyah dan PAN di Kalasan jatuh pada Pemilu 2009, beberapa kadernya beralih ke PKS. Wilayah Kalasan itu menjadi pusat kekuatan PKS. Selain tempat kader PKS terbaik menetap, wilayah ini pula dikembangkan sebagai target pertama infiltrasi kader PKS masuk ke ranah pelayanan sosial, seperti RSI, puluhan SD dan TK Terpadu, puskesmas, koperasi, dan *Baitul Mal wa Tamwil*. Padahal di wilayah ini juga perjumpaannya dengan kelompok Kristen pun sangat kuat. Sebuah kontestasi politik dan dakwah yang berkolaborasi dengan berbagai kepentingan partai, baik itu dilakukan melalui proses konstruksi sosial yang wajar ataupun melalui *by design*. Salah satu dampak yang paling nyata adalah memudarnya kebiasaan sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat di wilayah-wilayah terjadinya pertarungan politik-agama itu.

Penutup

Apa yang dimaksud dengan "Djawa Tengah Kotor," seperti judul artikel *Soerabaya Post* tentang pergolakan akibat Pemilu 1955, sesungguhnya berada pada konteks ruang di mana skematisasi internalisasi dakwah demi kepentingan politik dilakukan. Meskipun ruang itu adalah Djawa Tengah, bukan berarti secara otomatis menunjuk persis Jawa Tengah saja. Kewilayahannya mencakup Yogyakarta, karena kontestasi itu berada di wilayah perbatasan keduanya. Kesan "kotor" didapatkan ketika dakwah agama ditampilkan untuk kepentingan partai sebagai bentuk asli proses konstruksi sosial yang ada, sebagai nama lain dari politik kekuasaan. Proses ini bukanlah "barang baru" yang tiba-tiba hadir menjelang Pemilu 2009. Menilik kesejarahan perpolitikan Jawa Tengah,

maka proses skematisasi internalisasi seperti ini telah hadir jauh sebelumnya. Sebut saja SI di Surakarta dan Banjarnegara, Partai NU dan Masyumi di Yogyakarta. Kepentingan dari penggunaan skema agama dalam politik adalah untuk memenangi atau menyaingi partai nasionalis dan komunis, seperti PNI dan PKI di Pemilu 1955. Akhirnya, berdasarkan kasus sebelumnya, skema perpolitikan yang ada pada Pemilu 2009 adalah reinkarnasi antara politik dan agama dalam versi terbaru, di mana PKS sebagai pelaku utamanya. Walaupun harus diakui bahwa PKS telah melampaui partai agama sebelumnya, seperti Partai NU, Masyumi, dan SI. PKS juga mampu mengubah kebiasaan sosial dan politik masyarakat yang selama ini dikenal sebagai basis kelompok nasionalis dan kaum *abangan* secara internalisasi keagamaan.

Hal ini terlihat jelas ketika pengembangan jejaring dan penguatan kader di lapangan sengaja dilakukan tidak semata kepentingan dakwah agama. Politik menempel ke dakwah, atau sebaliknya dakwah menempel ke politik, sehingga melahirkan satu kecenderungan politik-agama. Meskipun hal ini menguntungkan bagi proses eksternalisasi, internalisasi, dan obyektifikasi agama, namun rasionalisasinya tetap mengutamakan kepentingan partai yang bisa membahayakan dakwah bagi agamanya. Bila terjadi sesuatu yang berhubungan dengan partai beserta aparturnya saat kontestasi politik kekuasaan itu dilakukan, maka agama itu yang mendapatkan citra buruk. Walaupun dalam konteks politik, khususnya pasca Orde Baru, skema politik-agama beserta kontestasi seperti ini akan selalu dianggap wajar, namun terlalu beresiko saat (dakwah) agama menjadi fasilitas tindakan komunikasi politiknya. Oleh

karena itu, dalam konteks politik, mengutip pendapat Hamid Basyaib (2007), ideologi (dan praktik) agama yang diusung oleh partai, semacam PKS dan SI dahulu, menjadi pisau bermata dua; alat ampuh untuk meraup suara, sekaligus bisa melukai agama itu, dan yang paling dirugikan pastilah masyarakat penganut keagamaannya.

Kenyataan seperti inilah yang mendorong tulisan ini merekomendasikan dua hal. *Pertama*, agar partai politik

berusaha memisahkan aspek-aspek dan institusi keagamaan dengan institusi politik praktis. Gagasan ini bisa mendorong pemerintah untuk segera mengusung aturan-aturan yang tegas terhadap pemisahan agama dan politik itu. *Kedua*, mendorong kesadaran masyarakat untuk dapat memisahkan urusan agama dan urusan politik, sehingga mereka mampu menjaga kebiasaan sosial budaya dan tradisi keagamaan, khususnya yang membuahkan nilai dan praktik hidup keharmonisan di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Wa'iy, Taufiq Y. 2003. *Kekuatan Sang Murabbi*. Bandung: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Berger, Peter L. 1991. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Boudrillard, Jean. 1983. *Simulation*. New York: Semiotext[e].
- Bourdieu, Pierre. 1993. *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature Pierre Bourdieu*. Randal Johnson (ed). Columbia: Columbia University Press.
- Damanik, Ali Said. 2002. [Fenomena Partai Keadilan: Transformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia](#). Bandung: Teraju Mizan Group
- Djojopoespito, Soewarsih. 1953. *Siluman Karangobar*. Jakarta: Pembangunan.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*. Glenceo: The Free Press, 1960.
- Hefner, Robert W. 1990. *Geger Tengger*. Yogyakarta: LKiS.
- Jackson, Karl D. 1990. *Kewibawaan Tradisional, Islam dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat*. Terj. M. Maksun. Jakarta: Grafiti.
- Kayam, Umar. 2002. *Roman Para Priyayi*. Jakarta: Depdikbud.
- Katz, Robert S. and Richard Mair. 2002. "The Ascendancy of the Party in Public Office Party Organizational Change in Twentieth-Century Democracies", dalam Richard Gunter. *Political Party: Old Concepts and New Challenges*. New York: OUP.
- Korver, A.P.E. 1985. *Sarekat Islam: Gerakan Ratu Adil*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Muhtadi, Burhanuddin
. 2012. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Gramedia
- Mulkhan, Abdul Munir. 2000. *Islam Murni di Masyarakat Petani*. Yogyakarta: Bentang.
- Pringgodigdo, A. K. 1994. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Syihabuddin, M dan Syatiba. 2006. *Kapasitas Kelembagaan PKS*. Penelitian SR-Ins.

Wahid, Abdurrahman (ed). 2008. *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Trans-nasional di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, Bhinneka Tunggal Ika&Maarif.

Website

Basyaib, Hamid. 2009. "Dilema Partai Agama" dalam *Islamlib.com*. Diakses 10 Juli.

www.kpu.go.id; www.kpu-sleman.go.id; www.kpu-diy.go.id; www.kpu-klaten.go.id

<http://pemilu.detiknews.com/quickcount>

<http://www.scribd.com/doc/85420840/64/Tabel-5-1-Definisi-dan-Tujuan-Pembinaan-Tiap-Jenjang-Keanggotaan-PKS1>

Dokumen dan Arsip

Angkatan Bersendjata (Jakarta), 1965-1966

Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera.

Arya Budi. "Presidensialisasi Partai Politik" dalam *Kompas*, 13 Juli 2012.

Database profil Wonogiri 1950-1960; Profil Sleman 1950-1960; Profil Klaten 1950-1960

Dokumen Hasil Perolehan Suara Legislatif dan Pilpres 2009 Kab. Klaten dan Sleman

Lima Besar Pemenang Pemilu 2009 di Kabupaten Klaten. Klaten: KPU Kab. Klaten.

Munandar, Arief. 2011. "Antara Jemaah dan Partai Politik: Dinamika Habitus Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Arena Politik Indonesia Pasca Pemilu 2004". *Disertasi Universitas Indonesia Jurusan Sosiologi*.

Pengurus Pusat Muhammadiyah. *Surat Keputusan Nomor 149/KEP/1.0/B/2006 tentang Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah*

Pewarta Soerabaia (Surabaya), 1949-1957